

RENCANA KERJA TAHUN 2022



**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KOTA SAMARINDA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022.

Dokumen ini berisi tentang gambaran umum pengelolaan Sumber Daya Manusia/ Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kota Samarinda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Samarinda. Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022, dengan maksud agar dapat digunakan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Daerah Kota Samarinda Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik, saran/ pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan, untuk penyempurnaan Renja di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga informasi singkat pada dokumen ini berguna dan bermanfaat.

Samarinda, 12 April 2021

Plt. Kepala BKPPD Kota Samarinda,

Irmina Idang.Spd.M.Si
NIP. 196906132000122008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
	HALAMAN
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3. Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
4.1. Rencana Kerja	43
4.2. Rencana Pendanaan	
BAB V PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya manusia oleh Pemerintah Daerah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dalam perjalanannya dan tuntutan zaman telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menandai terjadinya perubahan manajemen pengelolaan sumber daya manusia dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang berimplikasi semakin mandirinya peranan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya manusia.

Agar terwujudnya pemerintahan yang baik, maka dilaksanakan pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepegawaian.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, fungsi perencanaan sangat diperlukan sebagai sebuah peta yang berisikan apa yang akan dikerjakan meliputi : bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan; serta menjelaskan tujuan, strategi, sasaran, dan target yang dapat diukur secara sistematis.

Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa “Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disebut juga Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja PD”, menjabarkan sasaran dan program dalam 1 tahun yang ditetapkan oleh setiap perangkat daerah melalui kegiatan tahunan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda sesuai ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) PD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2021- 2026 PD dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Renja Pemerintah Daerah ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program perangkat daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut untuk menata SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah dibentuklah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) yang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan KEPRES Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Pembentukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan jabaran

tugas dan fungsinya tertuang pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata pemerintahan yang demokratis (*democratic and good governance*). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional, dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus dikembangkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program serta kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 029 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016- 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022, sedangkan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah
	4.2. Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Renja 2022 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kota Samarinda, melaporkan hasil evaluasi kegiatan tahun 2021 mempunyai yang mempunyai 3 (tiga) program yang berisikan 30 kegiatan sampai dengan triwulan ke I mencapai perkembangan Fisik sebesar 6 % dan realisasi keuangan 5.58 % dan kegiatan pada Tahun 2020 dengan capaian kinerja 95.67 %. **Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat tabel T-C 29.* Sedangkan untuk rencana kerja pada Tahun 2022, yang diprioritaskan ada 3 Program 11 kegiatan dan 58 sub kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud diharapkan mampu mendukung dalam memberikan pelayanan yang optimal, kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota Samarinda selaku stakeholdernya. Disamping kegiatan tersebut diatas diperlukan kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan/ Peraturan Pemerintah tentang kepegawaian. Kegiatan pembinaan aparatur, diharapkan dapat berdampak pada kelancaran dalam memberikan layanan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk tahun n-2, n-1, tahun n dan tahun n+1 *Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan*

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel – C.30

Indikator	SPM/St andart Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
			Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
2	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	13
Sertifikasi Kompetensi					10%	15%			10%	15%	
Jumlah dokumen					0	0			0	0	
Jumlah dan kebutuhan formasi jabatan ASN					373	384			373	384	
Jumlah Rekrutmen pegawai dan pemberkasan NIP ASN					218	225			218	225	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan ASN yang Akuntabel					Lap	Lap			Lap	Lap	
Jumlah Surat Keputusan (SK) PNS Yang Pensiun					350	350			350	350	
Jumlah Dokumen Kebijakan data Informasi					1	1			1	1	
Jumlah Modul yang dibuat					2	2			2	2	
Jumlah data PNS yang diusulkan untuk perubahan identitas					684	705			684	705	
Jumlah Modul Yang di evaluasi dan pelihara (maintenance)					2	2			2	2	
1. Jumlah PNS Pelaksana yang Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pekot Samarinda.					57	59			57	59	
2. Jumlah PNS Mutasi Masuk dan Keluar Pekot Samarinda antar Kabupaten/Kota Satu Provinsi.					20	21			20	21	

3. Jumlah PNS Mutasi Masuk dan Keluar Pemkot Samarinda antar Kabupaten/Kota antar Provinsi.				15	15			15	15	
4. Jumlah PNS Mutasi Masuk dan Keluar Pemkot Samarinda ke Pusat atau sebaliknya.				3	1			3	1	
Jumlah Usulan KP				0	0			0	0	
Jumlah SK Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan pengawas ASN				113	116			113	116	
Jumlah ASN yang lulus diklat										
Jumlah ASN yang dinilai				0	0			0	0	
Jumlah dokumen				0	0			0	0	
Jumlah dokumen kerjasama				0	0			0	0	
Jumlah dokumen				0	0			0	0	
Jumlah dokumen				0	0			0	0	
Jumlah dokumen kerjasama				1	17			1	17	
Jumlah dokumen				0	0			0	0	
Jumlah ASN				0	0			0	0	
Jumlah ASN				249	256			249	256	
Jumlah Jabatan Fungsional										
Jumlah Dokumen				1	1			1	1	
1. Jumlah Pegawai yang melaporkan Hasil Penilaian Kinerjanya				Org	Org			Org	Org	
2. Jumlah Pegawai yang mendapat nilai dengan predikat baik dan sangat				0	0			0	0	

baik										
Jumlah PNS Yang menerima Penghargaan				5	5			5	5	
Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah Janji				170	175			170	175	
Jumlah Penyelesaian Cuti PNS				200	206			200	206	
Jumlah Penyelesaian Uang Duka ASN				80	82			80	82	
Jumlah PNS Yang menerima Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya				600	618			600	618	
Jumlah Penghargaan, Sumpah Janji, Cuti, Uang Duka ASN, Satyalencana Karya Satya				0	0			0	0	
Jumlah ASN yang Mengikuti Tes Urine				0	0			0	0	
Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur				14	14			14	14	
Jumlah SK Rekomendasi dari Walikota				6	6			6	6	
Jumlah dokumen				0	0			0	0	
1. Fasilitas Tugas Belajar				15	15			15	15	
2. Izin Belajar				54	56			54	56	
3. Diklat Teknis				0	0			0	0	
4. Diklat Fungsional				0	0			0	0	
5. Kepemimpinan				125	129			125	129	
6. Latsar				218	225			218	225	
Jumlah Dokumen				0	1			0	1	

Jumlah ASN				0	15			0	15	
Jumlah Dokumen				0	1			0	1	
Jumlah dokumen				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
Jumlah dokumen				0	15			0	15	
Jumlah dokumen MOU				0	0			0	0	
Jumlah ASN dan CPNS				0	0			0	0	
Jumlah dokumen				0	0			0	0	
IKM				66	67			66	67	
Jumlah Dokumen										
Jumlah dokumen				8	8			8	8	
Jumlah dokumen				8	8			8	8	
Jumlah dokumen				0	0			0	0	
Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan				64	63			64	63	
Gaji dan tunjangan non ASN yang dibayarkan				64	63			64	63	
Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya				0	0			0	0	
Jumlah ASN yang Diklat				0	0			0	0	
Jumlah peraturan yang disosialisasikan				0	0			0	0	
Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				23	43			23	43	
Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18	11			18	11	
Jumlah bahan logistik				38	48			38	48	
Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan				1014	3127			1014	3127	
Jumlah tamu yang berkunjung				0	0			0	0	
Jumlah SPPD				10	13			10	13	
Arsip dinamis yang diarsipkan				17	18			17	18	

Jumlah rekening yang dibayarkan				2	2			2	2	
Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				5	11			5	11	
Tagihan jasa pelayanan umum				29	78			29	78	
Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan				28	28			28	28	
Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung				1	1			1	1	
Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan pra sarana gedung				10	25			10	25	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi.

Berdasarkan **identifikasi permasalahan** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPPD, maka dapat ditentukan **isu-isu penting** sebagai berikut :

- a. *Sistem Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan PP No. 30 Th. 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.*

Hal tersebut di atas dijadikan isu strategis lantaran :

- (1) Penilaian prestasi kerja PNS sebelumnya memakai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 yang memakai istilah Prestasi Kerja dan sasaran penilaian adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, nilai prestasi dinyatakan dengan angka dan sebutan. Peraturan dan sistem penilaian kinerja tersebut dinilai masih kurang memadai untuk menentukan apakah seorang PNS benar memiliki kinerja yang sesuai dengan nilai yang diperoleh.

- (2) Peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil . Dengan istilah baru Kinerja PNS, sasaran kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi / unit sesuai dengan SKP dan perilaku Kerja . Aspek perilaku kerja lebih diutamakan pada inisiatif kerja.

b. Peningkatan Saran dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran :

- (1) Halaman parkir yang masih belum memadai , karena kantor BKP2D masih satu lokasi dengan gedung- gedung pemerintahan lainnya
- (2) Sarana dan prasarana di ruang pelayanan yang masih belum memadai. Seperti belum tersedianya kartu antrian elektronik .

c. Penerapan Regulasi

Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran :

- (1) tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang diterapkan secara konsisten dan transparansi serta akuntabel;
- (2) pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian agar prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.

Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun ke depan adalah :

- a. Sosialisasi PP No. 30 Th. 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan membuka Klinik SKP bagi seluruh PNS yang ingin berkonsultasi tentang penyusunan SKP;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan di kantor BKPPD;
- c. Sosialisasi kepada Pejabat di masing- masing OPD yang tugas pokoknya membawahi bidang kepegawaian, serta penataan PNS daerah sesuai aturan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BKPPD tidak jauh berbeda yang membedakan adalah nama dan kode kegiatan yang berubah mengikuti aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi untuk pembinaan dan pengembangan aparatur sebagaimana terlihat dalam tabel T- C 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD terlampir.

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKP2D Kota Samarinda	Sertifikasi Kompetensi	15%	9.525.000.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKP2D Kota Samarinda	Sertifikasi Kompetensi	15%	9.525.000.000	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah dokumen	Dokumen	100.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah dokumen	Dokumen	100.000.000	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN		Jumlah dan kebutuhan formasi jabatan ASN	2 Kegiatan	75.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN		Jumlah dan kebutuhan formasi jabatan ASN	2 Kegiatan	75.000.000	
Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Rekrutmen pegawai dan pemberkasan NIP ASN	250 Orang	1.500.000.000	Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Rekrutmen pegawai dan pemberkasan NIP ASN	250 Orang	1.500.000.000	
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan ASN yang Akuntabel	Laporan	50.000.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan ASN yang Akuntabel	Laporan	50.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Surat Keputusan (SK) PNS Yang Pensiun	400	350.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Surat Keputusan (SK) PNS Yang Pensiun	400	350.000.000	
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Kebijakan	1	50.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Kebijakan	1	50.000.000	

		data Informasi					data Informasi			
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Modul yang dibuat	1 Modul	150.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Modul yang dibuat	1 Modul	150.000.000	
Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah data PNS yang diusulan untuk perubahan identitas	100 KITAS	100.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah data PNS yang diusulan untuk perubahan identitas	100 KITAS	100.000.000	
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Modul Yang di evaluasi dan pelihara (maintenance)	2 Modul	100.000.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Modul Yang di evaluasi dan pelihara (maintenance)	2 Modul	100.000.000	
Mutasi dan Promosi ASN					Mutasi dan Promosi ASN					
Pengelolaan Mutasi ASN		1. Jumlah PNS Pelaksana yang Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkot Samarinda.	65 SK	350.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN		1. Jumlah PNS Pelaksana yang Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkot Samarinda.	65 SK	350.000.000	
		2. Jumlah PNS Mutasi Masuk dan Keluar Pemkot Samarinda antar Kabupaten/Kota Satu Provinsi.	22	-			2. Jumlah PNS Mutasi Masuk dan Keluar Pemkot Samarinda antar Kabupaten/Kota Satu Provinsi.	22	-	

		3. Jumlah PNS Mutasi Masuk dan Keluar Pemkot Samarinda antar Kabupaten/Kota antar Provinsi.	15	-			3. Jumlah PNS Mutasi Masuk dan Keluar Pemkot Samarinda antar Kabupaten/Kota antar Provinsi.	15	-	
		4. Jumlah PNS Mutasi Masuk dan Keluar Pemkot Samarinda ke Pusat atau sebaliknya.	1	-			4. Jumlah PNS Mutasi Masuk dan Keluar Pemkot Samarinda ke Pusat atau sebaliknya.	1	-	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Usulan KP	SK	500.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Usulan KP	SK	500.000.000	
Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah SK Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan pengawas ASN	150 SK	600.000.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah SK Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan pengawas ASN	150 SK	600.000.000	
Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang lulus diklat			Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang lulus diklat			
Pengelolaan Assessment Center		Jumlah ASN yang dinilai	150 ASN	200.000.000	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah ASN yang dinilai	150 ASN	200.000.000	
Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN		Jumlah dokumen	30 Dokumen	60.000.000	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN		Jumlah dokumen	30 Dokumen	60.000.000	
Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat		Jumlah dokumen kerjasama	15 Orang	225.000.000	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat		Jumlah dokumen kerjasama	15 Orang	225.000.000	

Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN		Jumlah dokumen	30 laporan	60.000.000	Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN		Jumlah dokumen	30 laporan	60.000.000	
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah dokumen	200 dokumen	25.000.000	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah dokumen	200 dokumen	25.000.000	
Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional		Jumlah dokumen kerjasama	200	3.000.000.000	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional		Jumlah dokumen kerjasama	200	3.000.000.000	
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi pejabat fungsional		Jumlah dokumen	200 laporan	10.000.000	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi pejabat fungsional		Jumlah dokumen	200 laporan	10.000.000	
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN	200 Orang	100.000.000	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN	200 Orang	100.000.000	
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN	200 Jabatan	300.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN	200 Jabatan	300.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah Jabatan Fungsional	Jabatan	100.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah Jabatan Fungsional	Jabatan	100.000.000	
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1. Jumlah Pegawai yang melaporkan Hasil Penilaian Kinerjanya	Org	200.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1. Jumlah Pegawai yang melaporkan Hasil Penilaian Kinerjanya	Org	200.000.000	
		2. Jumlah Pegawai yang mendapat nilai dengan predikat baik dan sangat baik					2. Jumlah Pegawai yang mendapat nilai dengan predikat baik dan sangat baik			

Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah PNS Yang menerima Penghargaan	5 org	350.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah PNS Yang menerima Penghargaan	5 org	350.000.000	
		Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah Janji	250 org				Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah Janji	250 org		
		Jumlah Penyelesaian Cuti PNS	200				Jumlah Penyelesaian Cuti PNS	200		
		Jumlah Penyelesaian Uang Duka ASN	80 sk				Jumlah Penyelesaian Uang Duka ASN	80 sk		
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah PNS Yang menerima Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	600 org	170.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah PNS Yang menerima Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	600 org	170.000.000	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Jumlah Penghargaan , Sumpah Janji, Cuti, Uang Duka ASN, Satyalencana Karya Satya	1135 Lap	200.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Jumlah Penghargaan , Sumpah Janji, Cuti, Uang Duka ASN, Satyalencana Karya Satya	1135 Lap	200.000.000	
Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mengikuti Tes Urine	400 Orang	100.000.000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mengikuti Tes Urine	400 Orang	100.000.000	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin		Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur	15	250.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin		Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur	15	250.000.000	
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah SK Rekomendasi dari Walikota	10 SK	100.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah SK Rekomendasi dari Walikota	10 SK	100.000.000	

Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah dokumen		100.000.000	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah dokumen		100.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1. Fasilitas Tugas Belajar	10	3.352.244.280	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1. Fasilitas Tugas Belajar	10	3.352.244.280	
		2. Izin Belajar	50				2. Izin Belajar	50		
		3. Diklat Teknis	25				3. Diklat Teknis	25		
		4. Diklat Fungsional	15				4. Diklat Fungsional	15		
		5. Kepemimpinan	130				5. Kepemimpinan	130		
		6. Latsar	200				6. Latsar	200		
Pengembangan Kompetensi Teknis					Pengembangan Kompetensi Teknis					
Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintah umum .		Jumlah ASN	100 ASN	1.000.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintah umum .		Jumlah ASN	100 ASN	1.000.000.000	

Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan administrasi penyelenggara pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan.		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan administrasi penyelenggara pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan.		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Menejerial dan Fungsional					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Menejerial dan Fungsional					
Penyusunan Kebijakan Teknis Dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerja sama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan pra jabatan (Latsar)		Jumlah dokumen	12 dok	50.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerja sama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan pra jabatan (Latsar)		Jumlah dokumen	12 dok	50.000.000	
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Negeri Kab / Kota					Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Negeri Kab / Kota					
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah kabupaten / Kota		Jumlah dokumen	15 dok	200.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah kabupaten / Kota		Jumlah dokumen	15 dok	200.000.000	
Pelaksanaan kerjasama antar lembaga		Jumlah dokumen MOU	Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan kerjasama antar lembaga		Jumlah dokumen MOU	Dokumen	100.000.000	

Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemiminan dan pra jabatan (Latsar)		Jumlah ASN dan CPNS	258 ASN	1.752.244.280	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemiminan dan pra jabatan (Latsar)		Jumlah ASN dan CPNS	258 ASN	1.752.244.280	
Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerja sama serta pengembangan kompetensi pimpinan		Jumlah dokumen	12 Dokumen	50.000.000	Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerja sama serta pengembangan kompetensi pimpinan		Jumlah dokumen	12 Dokumen	50.000.000	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		IKM	68	11.002.279.000	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		IKM	68	11.002.279.000	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen	2 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen	2 Dokumen	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen	6 Dokumen	110.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen	6 Dokumen	110.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	2 Dokumen	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	2 Dokumen	50.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	63	7.591.279.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	63	7.591.279.000	

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Gaji dan tunjangan non ASN yang dibayarkan	Org	400.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Gaji dan tunjangan non ASN yang dibayarkan	Org	400.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	90 steel	55.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	90 steel	55.000.000	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah ASN yang Diklat	20 orang	300.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah ASN yang Diklat	20 orang	300.000.000	
Sosialisasi peraturan perundang - undangan		Jumlah peraturan yang disosialisasikan	org	200.000.000	Sosialisasi peraturan perundang - undangan		Jumlah peraturan yang disosialisasikan	org	200.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	10.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	10.000.000	
Penyediaan peralatan perlengkapan kantor		Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	15.000.000	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor		Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	15.000.000	
Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik	10 Jenis	80.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik	10 Jenis	80.000.000	

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	dokumen	50.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	dokumen	50.000.000	
Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	Kegiatan	40.000.000	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	Kegiatan	40.000.000	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah SPPD	SPPD	650.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah SPPD	SPPD	650.000.000	
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Arsip dinamis yang diarsipkan	18 ASN	600.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Arsip dinamis yang diarsipkan	18 ASN	600.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening yang dibayarkan	12 rek	180.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening yang dibayarkan	12 rek	180.000.000	
Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor		Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	11 buah	75.000.000	Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor		Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	11 buah	75.000.000	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tagihan jasa pelayanan umum	78 jasa	25.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tagihan jasa pelayanan umum	78 jasa	25.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	456.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	456.000.000	

Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Tagihan pemeliharaan / rehabilitasi gedung	Unit	30.000.000	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Tagihan pemeliharaan / rehabilitasi gedung	Unit	30.000.000	
Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Tagihan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan pra sarana gedung	Unit	35.000.000	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Tagihan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan pra sarana gedung	Unit	35.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari usulan di renstra terdapat 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 62 sub kegiatan. yaitu dapat dilihat pada tabel – C.32 Usulan Program/ Kegiatan Baru PD BKPPD Kota Samarinda Tahun 2020.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKP2D Kota Samarinda	Sertifikasi Kompetensi	Dokumen	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			Kegiatan	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah dokumen	Dokumen	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN		Jumlah dan kebutuhan formasi jabatan ASN	Formasi	
	Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Rekrutmen pegawai dan pemberkasan NIP ASN	ASN	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan ASN yang Akuntabel	Laporan	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Surat Keputusan (SK) PNS Yang Pensiun	SK	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Kebijakan data Informasi	Dokumen	
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Modul yang dibuat	Modul	
	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah data PNS yang diusulkan untuk perubahan identitas	Kitas	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Modul Yang di evaluasi dan pelihara (maintenance)	Modul	
3	Mutasi dan Promosi ASN				
	Pengelolaan Mutasi ASN		1. Jumlah PNS Pelaksana yang Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkot Samarinda.	ASN	

			2. Jumlah PNS Mutasi Masuk dan Keluar Pemkot Samarinda antar Kabupaten/Kota Satu Provinsi.	ASN	
			3. Jumlah PNS Mutasi Masuk dan Keluar Pemkot Samarinda antar Kabupaten/Kota antar Provinsi.	ASN	
4			4. Jumlah PNS Mutasi Masuk dan Keluar Pemkot Samarinda ke Pusat atau sebaliknya.	ASN	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Usulan KP	Usulan	
5	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah SK Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan pengawas ASN	ASN	
	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang lulus diklat	ASN	
	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah ASN yang dinilai	ASN	
6	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN		Jumlah dokumen	Dokumen	
	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat		Jumlah dokumen kerjasama	Dokumen	
7	Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN		Jumlah dokumen	Dokumen	
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah dokumen	Dokumen	
	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional		Jumlah dokumen kerjasama	Dokumen	
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi pejabat fungsional		Jumlah dokumen	Dokumen	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN	ASN	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN	ASN	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah Jabatan Fungsional	Jafung	
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen	Dokumen	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1. Jumlah Pegawai yang melaporkan Hasil Penilaian Kinerjanya	ASN	
			2. Jumlah Pegawai yang mendapat nilai dengan predikat baik dan sangat baik	ASN	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah PNS Yang menerima Penghargaan	ASN	
			Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah Janji	ASN	
			Jumlah Penyelesaian Cuti PNS	Rekomendasi	
			Jumlah Penyelesaian Uang Duka ASN	Rekomendasi	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah PNS Yang menerima Tanda Kehormatan Satyalencana Karya	ASN	

			Satya		
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Jumlah Penghargaan, Sumpah Janji, Cuti, Uang Duka ASN, Satyalencana Karya Satya	ASN	
	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mengikuti Tes Urine	ASN	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin		Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur	Kasus	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah SK Rekomendasi dari Walikota	SK	
	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah dokumen	Dokumen	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1. Fasilitas Tugas Belajar	Orang	
			2. Izin Belajar	Orang	
			3. Diklat Teknis	Orang	
			4. Diklat Fungsional	Orang	
			5. Kepemimpinan	Orang	
			6. Latsar	Orang	
	Pengembangan Kompetensi Teknis			ASN	
	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum		Jumlah Dokumen	Dokumen	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintah umum .		Jumlah ASN	ASN	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan administrasi penyelenggara pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan.		Jumlah Dokumen	Dokumen	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				
8	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerja sama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan pra jabatan (Latsar)		Jumlah dokumen	Dokumen	

	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Negeri Kab / Kota			Dokumen	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah kabupaten / Kota		Jumlah dokumen	Dokumen	
	Pelaksanaan kerjasama antar lembaga		Jumlah dokumen MOU	Dokumen	
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimian dan pra jabatan (Latsar)		Jumlah ASN dan CPNS	ASN	
	Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerja sama serta pengembangan kompetensi pimpinan		Jumlah dokumen	Dokumen	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		IKM	Nilai	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Dokumen	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Gaji dan tunjangan non ASN yang dibayarkan	Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Dokumen	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	Dokumen	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah ASN yang Diklat	ASN	
	Sosialisasi peraturan perundang - undangan		Jumlah peraturan yang disosialisasikan	ASN	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Steel	
	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor		Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	ASN	
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik	ASN	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Laporan realisasi anggaran yang dicetak		

			atau digandakan		
	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	Jenis	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah SPPD	Jenis	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Arsip dinamis yang diarsipkan	Jenis	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Dokumen	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening yang dibayarkan	SPPD	
	Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor		Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SPPD	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tagihan jasa pelayanan umum	ASN	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jasa	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Tagihan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung	Jenis	
	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Tagihan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan pra sarana gedung	Jasa	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Tagihan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung		
	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Tagihan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan pra sarana gedung	Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Renja BKPPD Kota Samarinda adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan, dan bersumber dari dokumen Renstra BKPPD periode 2021- 2026. Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kota Samarinda periode 2021-2026, sedangkan RPJMD Kota Samarinda bersumber juga dari RPJMD Propinsi Kaltim, selanjutnya RPJMD Propinsi Kaltim bersumber dari RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian. Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKPPD Kota Samarinda adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat.

1. Kementerian PAN dan RB

Visi

Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”

Misi

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik - *digital bureaucracy*.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.

3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

2. BKN PUSAT

VISI

Mewujudkan pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
2. Penyelenggaraan Manajemen ASN
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN
4. Pengawasan dan pengendalian norma, standart, prosedur dan kriteria manajemen ASN dan
5. Pengembangan dan mengoptimalkan pengembangan sistem manajemen internal BKN

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan Renja

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian BKPPD;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Meningkatkan perencanaan, pengembangan dan penataan karir PNS;
4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme serta kualitas aparatur;

5. Meningkatkan kesejahteraan PNS.

b. Sasaran Renja

1. Memberikan standar pelayanan minimal dibidang kepegawaian melalui sistem layanan terpadu;
2. Memudahkan distribusi dan informasi bagi pihak yang memerlukan;
3. Penataan karier PNS secara proporsional, transparan dan akuntabel pada jenjang jabatan struktural dan fungsional;
4. Meningkatnya kinerja aparatur daerah agar dapat memberikan kontribusi pelayanan yang baik kepada masyarakat;
5. Memberikan penghargaan kepada PNS yang memiliki etos kerja/ disiplin kerja yang baik.

1.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2022 sebanyak 3 program 12 kegiatan dan 47 sub kegiatan :

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- 1 Pengelolaan Data Kepegawaian
- 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- 4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK
- 5 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- 6 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
- 7 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Mutasi dan Promosi ASN

- 8 Pengelolaan Mutasi ASN
- 9 Pengelolaan Promosi ASN
- 10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Pengembangan Kompetensi ASN

- 11 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
- 12 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional

- 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
- 14 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
- 15 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- 16 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan fungsional ASN
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
- 17 Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 18 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- 19 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
- 20 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
- 21 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- 22 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan Kompetensi Teknis

- Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Umum, Inti dan Pilihan Bagi
- 23 Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan Administrasi
- 24 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga
- 25 pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan pra jabatan (Latsar)
- 26 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi
- 27 pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan (Latsar)

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KAB / KOTA**

**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

28 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

29 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD

30 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

31 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

32 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

33 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

34 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

35 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

36 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan
fungsi

37 Sosialisasi peraturan perundang - undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

38 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor

39 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

40 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

41 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

42 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah**

43 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

44 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah**

45 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

46 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

47 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Rencana kerja tahun 2022 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) :

- 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Pengembangan Kompetensi Teknis
- 8 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- 9 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- 10 Mutasi dan Promosi ASN
- 11 Pengembangan Kompetensi ASN
- 12 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

4.2 Rencana Pendanaan

Rencana pendanaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Samarinda Tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja yang ada adalah :

	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
1	Pengelolaan Data Kepegawaian	250.000.000
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	250.000.000
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	350.000.000
4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK	50.000.000
5	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.500.000.000
6	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	100.000.000
7	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	75.000.000
	Mutasi dan Promosi ASN	
8	Pengelolaan Mutasi ASN	350.000.000
9	Pengelolaan Promosi ASN	600.000.000
10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500.000.000
	Pengembangan Kompetensi ASN	
11	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	225.000.000
12	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2.999.989.500
13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	300.000.000
14	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	25.000.000
15	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	60.000.000
16	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan fungsional ASN	100.000.000
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
17	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	300.000.000
18	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	300.000.000
19	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	200.000.000
20	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	350.000.000
21	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	250.000.000
22	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	100.000.000

	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	
23	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000
24	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	1.000.000.000
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
25	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan pra jabatan (Latsar)	50.000.000
26	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	. 200.000.000
27	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan (Latsar)	1.752.244.280
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
28	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000
29	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	30.000.000
30	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000
31	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000
32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	50.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

33	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.081.976.000
34	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	611.800.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
35	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54.000.000
36	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	290.180.000
37	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	199.700.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
38	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	10.000.000
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.500.000
40	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.321.785
41	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.480.000
42	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
43	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000
44	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
45	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	456.000.000
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.702.000
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.500.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Samarinda Tahun 2022 sebagai acuan dalam pembangunan sektor Kepegawaian di Kota Samarinda yang didasari pada prinsip-prinsip “*good governance*”.

Terwujudnya “*good governance*” sangat dibutuhkan sehingga mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam rangka reformasi birokrasi di bidang kepegawaian.

Untuk mencapai kebijakan tersebut diperlukan adanya peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang dirumuskan secara sistematis dalam bentuk rincian kegiatan setiap tahunnya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Samarinda dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.